

***THE INFLUENCE OF ACCOUNTABILITY FOR MANAGEMENT OF VILLAGE FUNDS AND GENUINE REVENUE ON THE TRUST OF POJOK VILLAGE COMMUNITIES, CAMPURDARAT DISTRICT, TULUNGAGUNG DISTRICT***

**PENGARUH AKUNTABILITAS PENGELOLAAN DANA DESA DAN PENDAPATAN ASLI DAERAH TERHADAP KEPERCAYAAN MASYARAKAT DESA POJOK KECAMATAN CAMPURDARAT, KABUPATEN TULUNGAGUNG**

**Ikhsan<sup>1</sup>, Faizal Satria Desitama<sup>2</sup>**

UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung<sup>1,2</sup>

[Akangikhsan12@gmail.com](mailto:Akangikhsan12@gmail.com)<sup>1</sup>, [Faizalsatria6@uinsatu.ac.id](mailto:Faizalsatria6@uinsatu.ac.id)<sup>2</sup>

**ABSTRACT**

*The purpose of this study is more community anxiety about development, finance and so on regarding village funds and regional original income, because there are various roads that are still comfortable to pass, this research uses a type of quantitative research which is a research method that uses data- data in the form of numbers as a tool to analyze and conduct research studies, especially what has been examined. The type of this research is descriptive research type. Because Pojok Village has 3 hamlets, namely Secang Hamlet, Gedangsewu Hamlet, and Pojok Hamlet, with a total of 50 respondents who were divided into 3 parts so that the questionnaire was evenly distributed to one village. The results of this study are that Accountability, Management of Village Funds, has no effect on public trust, but management of regional original income has a significant effect on community trust in Pojok Village, Campurdarat District, Tulungagung Regency*

**Keywords:** *Accountability, Management of Village Funds, Management of Local Own Revenue, Community Trust*

**ABSTRAK**

Tujuan dari penelitian ini adalah keresahan masyarakat tentang pembangunan, keuangan dan lain sebagainya mengenai dana desa dan pendapatan asli daerah, sebab ada berbagai ruas jalan yang masih tidak nyaman untuk dilalui, penelitian ini menggunakan jenis penelitian kuantitatif yang di mana teknik penelitian yang menggunakan pengolahan data numerik sebagai alat analisis dan kajian penelitian, khususnya yang telah diteliti. Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif. Karena Desa Pojok memiliki 3 dusun yaitu dusun secang, dusun gedangsewu, dan dusun pojok, dengan jumlah 50 responden yang dibagi menjadi 3 bagian supaya kuisioner merata ke satu desa. Hasil penelitian ini yaitu bahwa Akuntabilitas, Pengelolaan Dana Desa, tidak berpengaruh terhadap kepercayaan masyarakat, namun pengelolaan pendapatan asli daerah signifikan berpengaruh terhadap kepercayaan masyarakat di Desa Pojok Kecamatan Campurdarat Kabupaten Tulungagung

**Kata Kunci:** Akuntabilitas, Pengelolaan Dana Desa, Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah, Kepercayaan Masyarakat

**PENDAHULUAN**

Desa adalah kumpulan warga yang memiliki batasan daerah serta

memiliki hak untuk mengendalikan serta mengurus kepentingan warga. Desa juga ialah unit sangat dasar yang ada dalam sistem pemerintahan

Indonesia. Desa merupakan kesatuan warga hukum yang mempunyai kewenangan mengendalikan serta mengurus kepentingan warga setempat bersumber pada asal-usul serta adat-istiadat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan nasional serta terletak di wilayah Kabupaten. Pemerintah desa dipandu oleh kepala desa, kepala desa pula dibantu oleh perangkat desa untuk melaksanakan tugasnya baik dalam membuat kebijakan-kebijakan.

Program Dana Desa merupakan salah satu cara kerja pemerintah untuk mencari jawaban atas segudang persoalan yang dihadapi desa. Dana Desa (DD) adalah uang yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diperuntukkan bagi desa yang disalurkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten/kota, sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa. Menurut Pasal 19(1), dana desa digunakan untuk membiayai pemberdayaan, pembangunan, dan pemerintahan masyarakat.

Pengelolaan dana desa dikatakan akuntabel jika pengelolaan keuangan dapat dipertanggungjawabkan melalui perencanaan, pelaksanaan, pengelolaan kegiatan, dan penyajian laporan keuangan. Tujuan utama reformasi sektor publik adalah akuntabilitas. Secara umum akuntabilitas dapat diartikan sebagai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan organisasi dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan di masa lalu yang dilakukan secara periodik (Mustofa, 2012).

Agar terwujudnya akuntabilitas yang efektif maka perlu adanya penyampaian informasi yang dapat difahami. Akuntabilitas dimaksud untuk memastikan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah desa serata

menjembatani kesenjangan antara masyarakat dengan pemerintah (Aucoin & Heitman, 2000). Selain itu akuntabilitas juga dimanfaatkan sebagai mekanisme pertanggungjawaban atas kinerja pejabat publik yang dijabarkan melalui tindakan yang sesuai dengan perilaku etis. Akuntabilitas tidak hanya sebagai pertanggungjawaban keuangan serta formal suatu organisasi tetapi merupakan pertanggungjawaban yang meliputi kepatuhan pada peraturan, lingkungan organisasi, masyarakat, pemerintah (Mahayani, 2017).

**Tabel 1. Alokasi Dana Desa 5 Tahun Terakhir**



Sumber: Data Statistik Desa Pojok

**Tabel 2. Pendapatan Asli Daerah 5 tahun terakhir**



Sumber: Data Statistik Desa Pojok

Masih banyak kasus yang terkoneksi meski besarnya uang yang didapat. Pelaksanaan pertanggungjawaban dana desa di Desa Pojok sangatlah penting guna menumbuhkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pengelolaan dana desa. Itu semua belum sepenuhnya diisi dengan kegiatan dan layanan yang dibutuhkan masyarakatnya. Pertimbangkan tata kelola, pelaksanaan pembangunan, dan pemberdayaan warga.

Berdasarkan temuan pengamatan awal yang dilakukan oleh peneliti mengenai kasus tersebut di atas. Seperti yang diklaim beberapa warga Desa Pojok, administrasi tidak akan

diabaikan dalam pemerintahan sampai hal ini terjadi. Beberapa orang juga tidak mengetahui jumlah uang desa yang diterima, program tenaga kerja yang telah dilaksanakan, atau tujuan penggunaan dana tersebut. Yang lain mengklaim bahwa infrastruktur dan fasilitas yang disediakan desa tidak cukup untuk melaksanakan pembangunan tersebut. Warga terus mengeluhkan minimnya sarana dan prasarana, antara lain pembangunan dan pemeliharaan pelayanan, renovasi kantor dan lembaga desa, pembangunan infrastruktur ekonomi lokal, dan akses jalan yang masih dalam kondisi memprihatinkan. Kurangnya masyarakat yang terlibat adalah keluhan lain dari lingkungan yang terdapat di Desa Pojok.

Kondisi ini yang menyebabkan masyarakat tidak puas dan kurang percaya dengan pelayanan yang ada di pemerintahan desa. Sistem pengelolaan alokasi dana desa yang kurang difahami oleh berbagai pihak seperti masyarakat. Dalam pelaksanaan pembangunan di desa harus dikelola dengan baik agar perencanaan dan pengelolaan pembangunan dapat berjalan dengan baik. Jika desa menerapkan sikap yang terbuka dalam pengelolaan alokasi dana desa maka pelaksanaan pembangunan infrastruktur desa pada pelaksanaannya dapat berjalan dengan baik. Oleh karena itu, dalam proses pengelolaan alokasi dana desa serta program pemerintah desa perlu adanya akuntabilitas dan partisipasi masyarakat agar terwujudnya desa yang mandiri dan sejahtera.

Penelitian terdahulu yang serupa adalah Penelitian Eni Dwi Susliyanti. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana kepercayaan dan kepuasan masyarakat terhadap penggunaan dana desa dipengaruhi oleh akuntabilitas keuangan dan akuntabilitas kinerja. campuran teknik

penelitian (kuantitatif dan kualitatif). Survei yang dilakukan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta ini diikuti oleh 200 orang. Alat analisis Partial Least Square (PLS) 2.0 digunakan dalam teknik penelitian kuantitatif dan kualitatif penelitian ini. Temuan menunjukkan bahwa sementara akuntabilitas kinerja berdampak pada kepuasan dan kepercayaan masyarakat dalam penggunaan uang desa, tanggung jawab keuangan tidak berdampak pada keduanya. Penelitian Priyo Hari Adi (2013) berupaya untuk mengetahui dampak kepercayaan masyarakat terhadap pendapatan asli daerah (PAD), dampak investasi pembangunan terhadap pendapatan asli daerah (PAD), dan akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kotamobagu Selatan. Kabupaten Kotamobagu dimana temuan penelitiannya menunjukkan bahwa Kecamatan Kota Mobangu Selatan telah menerapkan akuntabilitas pengelolaan berdasarkan prinsiptransparansi, akuntabilitas, dan keterlibatan. Pelaporan dan pertanggungjawaban telah dilakukan sesuai prosedur sesuai ketentuan, namun kewenangan dan kegiatan desa masih lalai. Hambatan utama, yang masih membutuhkan bantuan pemerintah daerah, adalah kompetensi pengelolaan sumber daya. untuk mengintensifkan akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa di Kecamatan kotamobagu selatan dibutuhkan pembinaan, pelatihan, pengawasan, dan evaluasi secara berkelanjutan kepada aparat desa. Wikan Ilham Rasyidi (2021) hasil penelitian menunjukkan bahwa akuntabilitas dana desa berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas pelayanan publik masa pandemi COVID-19; transparansi dana desa berpengaruh negatif terhadap kualitas pelayanan publik masa pandemi COVID-19; kualitas pelayanan publik

masa pandemi COVID-19 berpengaruh positif signifikan terhadap kepercayaan masyarakat; akuntabilitas dana desa tidak berpengaruh terhadap kepercayaan masyarakat; transparansi dana desa tidak berpengaruh terhadap kepercayaan masyarakat pada Pemerintahan Desa di Kabupaten Sleman

Perbedaan penelitian ini dengan peneliti dahulu adalah variabel bebas yaitu Akuntabilitas, Pengelolaan Dana Desa, Pengelolaan Pendapatan Asli daerah dan variabel terkait yaitu Kepercayaan Masyarakat, yang dimana belum ada yang meneliti tentang Pengaruh Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Dan Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah terhadap Kepercayaan Masyarakat Desa Pojok Kecamatan Campurdarat Kabupaten Tulungagung.

## **Kajian Teori**

### **1. Akuntabilitas**

Tujuan Tata Pemerintahan yang Baik adalah untuk melindungi sinergi integrasi yang konstruktif antara ranah negara, sektor swasta, dan publik untuk menciptakan penyelenggaraan pemerintahan negara yang solid, bertanggung jawab, dan efisien. Oleh karena itu, dalam rangka menciptakan tata pemerintahan yang baik, pemerintah atau masyarakat sendiri harus berkolaborasi untuk meningkatkan kesadaran dan menanamkan kepedulian terhadap negara, sehingga terwujud tata kelola pemerintahan yang baik untuk selalu mematuhi peraturan atau standar yang telah ditetapkan. Akuntabilitas merupakan salah satu prasyarat untuk melaksanakan proses tata kelola yang baik. Akuntabilitas pada biasanya berhubungan pada proses pertanggungjawaban serangkaian wujud pelayanan yang diberikan ataupun yang sudah dilakukan. Akuntabilitas merujuk kepada pertanggungjawaban seorang

kepada pihak yang mempunyai hak guna memohon pertanggungjawaban. Akuntabilitas ialah suatu kewajiban dari pihak pemegang amanah buat membagikan pertanggungjawaban, menyajikan serta mengatakan seluruh kegiatan serta aktivitas yang jadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah tersebut.

Menurut Hoopwood dan Tamkins dalam Martha (2014), dimensi akuntabilitas yang harus dipenuhi oleh lembaga publik tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Akuntabilitas dan kejujuran hukum (accountability for probability and legality). Akuntabilitas dan kejujuran hukum adalah standar yang harus dipatuhi oleh lembaga publik. Penggunaan dana masyarakat harus dilakukan secara benar dan berwibawa.
- 2) Pertanggungjawaban proses (accountability process). Dalam hal kecukupan sistem informasi akuntansi dan lain-lain akuntabilitas proses terkait dengan prosedur yang telah dijalankan prosedur yang digunakan dalam melaksanakan tugas sudah memadai.
- 3) Akuntabilitas program (accountability program). Akuntabilitas program berkaitan dengan penyeimbangan apakah tujuan yang diterapkan dapat dipenuhi atau tidak, serta apakah organisasi telah mempertimbangkan alternatif program yang memberikan hasil optimal dengan biaya serendah mungkin.
- 4) Akuntabilitas terhadap kebijakan (polici akuntabilitas). Akuntabilitas kebijakan mengacu pada akuntabilitas lembaga publik atas kebijakan yang mereka terapkan.

### **2. Pengelolaan Dana Desa**

adalah program untuk memenuhi

rasa keadilan dan kesesuaian rakyat, jika dananya harus mengalir ke desa karena selama ini hanya warga kota yang diuntungkan, sedangkan warga desa dan kekayaan alamnya terkuras jauh di lubuk hati dan tidak dinikmati oleh rakyat. mereka. Kebijakan pemerintah pusat dalam pembentukan dana desa sudah tepat karena ada tuntutan dan harapan akan keadilan di masyarakat (Muhiddin, 2017). Dana Desa (DD) adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diperuntukkan bagi desa dan ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten/kota, sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014. Menurut Pasal 19(1), Dana Desa digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

Pasal 100 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa menyebutkan bahwa belanja Desa yang dituangkan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Desa digunakan dengan ketentuan sebagai berikut: a. paling sedikit 70% dari total anggaran belanja Desa digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan Desa, serta pemberdayaan warga Desa; serta b. 30% dari jumlah anggaran belanja Desa digunakan buat: a. Pemasukan senantiasanya serta tunjangan kepala Desa serta fitur Desa; b. Oprasional pemerintah Desa; c. Tunjangan serta oprasional Tubuh Permusyawaratan Desa; d. Insentif rukun orang sebelah sertaindun masyarakat.

### 3. *Pendapatan Asli Daerah*

Bagi Undang- undang No 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan

Keuangan Antara Pusat serta Wilayah Pasal 1 angka 18 kalau Pendapatan Asli Daerah, berikutnya diucap PAD merupakan pemasukan yang diperoleh wilayah yang dipungut bersumber pada peraturan wilayah cocok dengan peraturan perundang- undangan. Pendapatan Asli Daerah( PAD) bersumber pada pasal 157 huruf a Undang- Undang No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Wilayah mengisyaratkan kalau pemerintah wilayah dalam mengurus rumah tangganya butuh diberikan sumber- sumber pemasukan ataupun penerimaan keuangan wilayah buat membiayai segala kegiatan dalam rangka penerapan tugas- tugas pemerintahan serta pembangunan buat kesejahteraan warga secara adil serta menyeluruh, komponen tersebut berasal dari Hasil pajak wilayah, hasil retribusi wilayah, hasil pengelolaan kekayaan wilayah yang dipisahkan serta lain- lain PAD yang legal. Keempat komponen PAD tersebut pula ialah sumber- sumber keuangan wilayah, oleh

sebab itu, Pendapatan Asli Daerah ialah salah satu komponen sumber keuangandaerah. Bagi Halim di dalam novel karangan Phaureula Artha Wulandari serta EmyIryanie, Pendapatan Asli Daerah( PAD) ialah seluruh penerimaan yang diperoleh wilayah dari sumber- sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut bersumber pada peraturan wilayah cocok dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku. Pendapatan Asli Daerah( PAD) merupakan sumber pemasukan utama yang dipunyai oleh pemerintah wilayah. Berikut merupakan sebagian penanda yang bisa digunakan buat mengukur Pendapatan Asli Daerah:

a. Pajak Wilayah: Pajak wilayah merupakan sumber pemasukan utama dalam PAD. Penanda ini

- mengukur jumlah pajak yang sukses dikumpulkan oleh pemerintah wilayah dari pajak kendaraan bermotor, pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, serta pajak yang lain.
- b. **Retribusi Wilayah:** Retribusi wilayah merupakan bayaran ataupun tarif yang dibebankan oleh pemerintah wilayah kepada warga dalam pemakaian benda ataupun jasa yang disediakan oleh pemerintah wilayah, semacam retribusi parkir, retribusi pasar, serta retribusi kebersihan.
  - c. **Pendapatan Asli Daerah dari Sumber Energi Alam:** Penanda ini mengukur jumlah pemasukan yang diperoleh oleh pemerintah wilayah dari sumber energi alam semacam hasil tambang, hasil hutan, hasil pertanian, serta hasil perikanan.
  - d. **Pemasukan dari Industri Kepunyaan Wilayah:** Penanda ini mengukur jumlah pemasukan yang diperoleh oleh pemerintah wilayah dari perusahaan- perusahaan kepunyaan wilayah semacam industri air minum, industri listrik, industri gas, serta yang lain.
  - e. **Pemasukan dari Perdagangan:** Penanda ini mengukur jumlah pemasukan yang diperoleh oleh pemerintah wilayah dari aktivitas perdagangan di daerah pemerintah wilayah semacam pasar tradisional, pusat perbelanjaan, serta yang lain. (Emy Iryanie, 2018)

#### 4. *Kepercayaan*

Merupakan sikap orang, yang mengharapkan seorang supaya berikan khasiat positif. Terdapatnya keyakinan sebab orang yang di yakin hendak berikan khasiat serta melaksanakan apa yang di idamkan oleh orang yang berikan keyakinan. Sehingga, keyakinan jadi bawah untuk kedua belah pihak buat melaksanakan kerja sama,(

Deutsch dalam Tsalits, 2013). Hingga, keberhasilan akuntabilitas pengelolaan dana desa dalam perihal ini bisa dikatakan sukses kala terbangun keyakinan warga kepada pemerintah.

Menurut Yamagsih, dalam rahmawati( 2013) keyakinan merupakan selaku asumsi kalau tiap orang tidak bermaksud negative kepada dirinya. Sejalan dengan keyakinan bagi Dasgupta( 1988) dalam rahmawati( 2013) melaporkan keyakinan merupakan sesuatu perilaku buat mempercayai orang serta kelompok dengan tingkatan tertentu yang silih berhubungan. Pada tingkatan orang, kamu mempercayai seorang orang buat melaksanakan suatu bersumber pada apa yang kamu tahu tentangnya, diposisi kemampuannya, reputasi serta tidak cuma sebab ia cuma bilangia mau melaksanakannya. Pada tingkatan kolektif, bila kamu tidak yakin dalam sesuatu tubuh ataupun organisasi dengan mana orang berafiliasi, serta tidak hendak yakin padanya buat membuat konvensi ataupun kerja sama. Faktor-faktor yang membentuk kepercayaan seseorang terhadap yang lain menurut Mayer dalam Rahmawati (2013) yaitu:

- 1) **Kemampuan**  
kemampuan ialah rana spesifik, sebagai akibatnya individu membutuhkan keyakinan akan seberapa baik seseorang menawarkan peformanya.
- 2) **Integritas**  
Integritas terlihat asal konsistensi antara ucapan dan perbuatan menggunakan nilai-nilai dari seorang..
- 3) **Kebaikan hati**  
Kebaikan hati berkaitan dengan intensi (niat). ada ketertarikan dalam diri seorang saat berintraksi menggunakan orang lain. Hal tersebut akan mengarahkannya buat

memikirkan orang tadi dan menyampaikan intense buat percaya atau tidak dengan orang tersebut. Kebaikan hati mencakup perhatian, ikut merasakan, keyakinan, serta daya terima.

**Hipotesis penelitian**

Hipotesis secara parsial dalam penelitian ini adalah:

- H0 :Akuntabilitas tidak berpengaruh signifikan terhadap kepercayaan masyarakat Desa Pojok Kecamatan Campurdarat Kabupaten Tulungagung.
- H1 :Akuntabilitas berpengaruh signifikan terhadap kepercayaan masyarakat Desa Pojok Kecamatan Campurdarat Kabupaten Tulungagung.
- H2 :Pengelolaan Dana Desa berpengaruh signifikan terhadap kepercayaan masyarakat Desa Pojok Kecamatan Campurdarat Kabupaten Tulungagung.
- H3 :Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah berpengaruh signifikan terhadap kepercayaan masyarakat Desa Pojok Kecamatan Campurdarat Kabupaten Tulungagung.
- H4 :Akuntabilitas, Pengelolaan Dana Desa, Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap kepercayaan masyarakat Desa Pojok Kecamatan Campurdarat Kabupaten Tulungagung.

**Gambar 1. Kerangka Penelitian**

Sumber: Gambar diolah peneliti,2023

**METODE PENELITIAN**

Untuk menganalisis, penelitian ini menggunakan jenis penelitian kuantitatif. Metode penelitian kuantitatif menggunakan data proses berupa angka-angka sebagai alat untuk mempelajari dan melakukan investigasi penelitian, khususnya apa yang telah diteliti. Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif. Penelitian semacam ini dilakukan untuk tujuan mendeskripsikan suatu masalah, oleh karena itu peneliti memilih metodologi ini. Masyarakat di Desa Pojok yang berjumlah 5.663 (lima ribu enam ratus enam puluh tiga) jiwa dijadikan sebagai populasi penelitian. Peneliti memilih untuk mengambil sampel dengan menggunakan rumus Taro Yamane karena besarnya populasi:

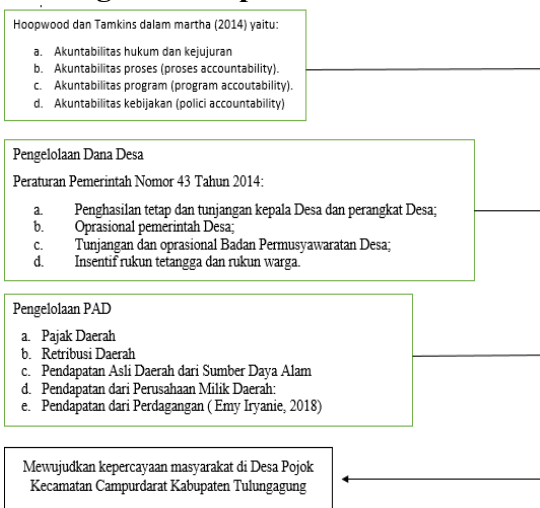
$$n = \frac{N}{(N \cdot (d) + 1)} = \frac{5663}{(5663 \cdot (0,2) + 1)}$$

$$n = \frac{5663}{114,26} = 49,56$$

n = Jumlah sample, N = Jumlah Populasi Yang di Ketahui, d = Presisi Yang Ditetapkan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, besar sampel untuk penelitian ini adalah 50 orang. Teknik penentuan besar sampel dalam penelitian menggunakan simple random sampling. Proses Pengumpulan Data menggunakan metode Observasi (pengumpulan data jangka panjang) dan Kuesioner (angket). Skala penelitiannya menggunakan 5 titik skala likert yaitu sangat setuju(5), setuju(4), Netral(3), tidak setuju(2), sangat tidak setuju (1). Teknik Analisis Data menggunakan SPSS (Statistical Package for Social Scene) Versi 26 dengan Uji Validitas dan Reabilitas, Uji Normalitas, Uji Multikolinieritas, Uji Heterokedastisitas, Uji T, Uji F, dan Koefisien.

**Kerangka Konseptual**





## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Uji Validitas dan Uji Reabilitas

Uji validitas membandingkan nilai  $r$  hitung (korelasi) dengan nilai  $r$  tabel (tabel product moment) dimana jumlah  $n$  (jumlah sampel) = 50, diperoleh nilai  $r$  tabel = 0,2787 dengan taraf signifikan 5% (0,05), dan variabel dinyatakan valid jika nilai  $r$  hitung  $>$   $r$  tabel. Sedangkan Ghazali (2011) mendefinisikan uji reliabilitas sebagai alat untuk mengukur suatu kuesioner yang berfungsi sebagai indikator suatu variabel. Jika nilai Cornbach's Alpha lebih besar dari 0,06 maka instrumen dikatakan reliabel (Ghazali, 2016).

**Tabel 3. Uji Validitas dan Uji Reabilitas**

Variabel	Cornbach's Alpha	R hitung	Keterangan
Akuntabilitas (X1)	0,613	0,339 s/d 0,739	Valid / Reliabel
Dana Desa (X2)	0,619	0,339 s/d 0,739	Valid / Reliabel
Pendapatan Asli Daerah (X3)	0,662	0,339 s/d 0,739	Valid / Reliabel
Kepercayaan Masyarakat (Y)	0,654	0,339 s/d 0,739	Valid / Reliabel

Sumber: pengolahan SPSS 26

Dari pernyataan tabel di atas bisa disimpulkan bahwa nilai  $r$  hitung  $>$   $r$  tabel maka variabel dinyatakan **valid**, dan Berdasarkan hasil uji tabel di atas maka bisa disimpulkan bahwa keempat variabel yang digunakan telah Reliabel karena nilai Cornbach's Alpha  $>$  0,06 maka bisa dikatakan keempatnya **Reliabel**

## Uji Hipotesis

### 1. Uji T

Hasil Uji Parsial (Uji T) ditunjukkan pada tabel 4 di bawah ini:

**Tabel 4. Uji T Coefficients<sup>a</sup>**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	6,629	4,524	1,465	,150
	Akuntabilitas	,067	,101	,076	,666
	Dana Desa	,180	,119	,172	1,514
	Pend. Asli Daerah	,517	,099	,598	5,247

a. Dependent Variable: Kepercayaan Masyarakat

Sumber : pengolahan SPSS 26

Diketahui bahwa variabel (X1)

nilai  $t$  hitung  $0,666 <$   $2,012$ , maka dapat disimpulkan bahwa H1 di tolak yang berarti variabel Akuntabilitas (X1) tidak berpengaruh secara parsial terhadap Kepercayaan Masyarakat (Y), sedangkan diketahui bahwa nilai  $t$  hitung  $1,514 <$   $2,012$ , maka dapat disimpulkan bahwa H2 di tolak yang berarti variabel Pengelolaan DD X2 tidak berpengaruh secara parsial terhadap Kepercayaan Masyarakat (Y), dan diketahui bahwa nilai  $t$  hitung  $5,247 >$   $2,012$ , maka dapat disimpulkan bahwa H3 di terima yang berarti variabel Pengelolaan PAD (X3) berpengaruh secara parsial dan positive antara variabel X1 terhadap Kepercayaan Masyarakat (Y). Dapat disimpulkan bahwa H3 yaitu Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah diterima dan berpengaruh signifikan terhadap kepercayaan masyarakat di Desa Pojok Kecamatan Campurdarat Kabupaten Tulungagung.

### Uji F

Uji F bertujuan untuk mencari apakah variabel independen secara bersama-sama (stimultan) mempengaruhi variabel dependen. Uji F dilakukan untuk melihat pengaruh dari seluruh variabel bebas secara bersama-sama terhadap variabel terikat.

**Tabel 5. Uji F ANOVA<sup>a</sup>**

Model	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	98,218	332,739	10,681	,000 <sup>b</sup>
	Residual	141,002	463,065		
	Total	239,220	49		

a. Dependent Variable: Kepercayaan Masyarakat

b. Predictors: (Constant), Pend. Asli Daerah, Dana Desa, Akuntabilitas

Sumber : pengolahan SPSS 26

Diketahui bahwa nilai F hitung  $10,681 >$   $2,80$  F tabel maka dapat disimpulkan bahwa H4 diterima yang berarti terdapat pengaruh variabel Akuntabilitas, Pengelolaan Dana Desa, Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah terhadap kepercayaan masyarakat Desa Pojok Kecamatan Campurdarat



Kabupaten Tulungagung

## 2. Koefisien Determinan

Analisis koefisien determinasi digunakan untuk menyatakan besar kecilnya kontribusi atau akuntabilitas (X1), Dana Desa (X2) dan Pendapatan Asli Daerah (X3) terhadap kepercayaan masyarakat (Y). nilai R<sup>2</sup> dapat dilihat pada hasil pengolahan data bagian model summary pada program SPSS versi 26.

**Tabel 6. Hasil Uji Koefisien Determinan**

Model	Model Summary			
	R	R Square	Adjusted R Square	Error of the Estimate
1	.657 <sup>a</sup>	.432	.395	1,752

a. Predictors: (Constant), PEND ASLI DESA, AKUNTABILITAS, DANA DESA

Sumber: pengolahan SPSS 26

Berdasarkan table 8 diatas, diketahui nilai R square sebesar 0,432. hal ini menunjukkan bahwa presentase sumbangan variabel independent yaitu akuntabilitas, dana desa, pendapatan asli daerah terhadap variabel dependen kepercayaan masyarakat yaitu sebesar 43% atau variasi variabel independent akuntabilitas, pengelolaan dana desa, pendapatan asli daerah yang digunakan dalam model mampu menjelaskan 43% variabel dependen kepercayaan masyarakat, sementara itu, 57% lainnya dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model penelitian.

## Pengaruh Akuntabilitas terhadap Kepercayaan Masyarakat

Berdasarkan hasil penelitian ini dapat dinyatakan bahwa akuntabilitas tidak berpengaruh signifikan terhadap kepercayaan masyarakat. Namun secara teori Hoopwood dan Tamkins dalam Martha (2014) bahwa Akuntabilitas merupakan salah satu prasyarat untuk melaksanakan proses tata kelola yang baik. Akuntabilitas biasanya berhubungan pada proses pertanggungjawaban serangkaian wujud

pelayanan yang diberikan ataupun yang sudah dilakukan. Semakin baik akuntabilitas maka akan semakin tinggi kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa.

Hal ini disebabkan karena akuntabilitas di Desa Pojok belum berjalan dengan baik, selain itu pemerintah desa membuat laporan pertanggung jawaban yang dimana laporan tersebut yang menjadikan masyarakat bingung untuk memahaminya dan tidak mengerti akan adanya laporan pertanggung jawaban tersebut.

## Pengaruh Pengelolaan Dana Desa terhadap Kepercayaan Masyarakat

Berdasarkan hasil penelitian ini dapat dinyatakan bahwa pengelolaan dana desa tidak berpengaruh signifikan terhadap kepercayaan masyarakat. Namun secara teori Supadmi dan Suputra (2018) bahwa pengelolaan dana desa adalah kewajiban pemerintah desa untuk pengelolaan dana desa, yang berdasarkan pada tata cara, praktik, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di desa sesuai dengan prinsip pengelolaan keuangan desa, semakin baik tata kelolanya maka semakin baik pengelolaannya.

Berdasarkan fakta dilapangan pengelolaan dana desa di Desa Pojok Kecamatan Campurdarat Kabupaten Tulungagung kurang berjalan dengan baik. Dari segi pelaksanaannya, pembangunan infrastruktur yang ada di Desa Pojok Kecamatan Campurdarat Kabupaten Tulungagung kurang bisa dikatakan meningkat. Proses pembangunan fisik maupun non fisik belum dilaksanakan sesuai dengan perencanaan yang telah disepakati bersama. Salah satunya kurangnya infrastruktur jalan ada beberapa ruas jalan bahkan hampir lebih 5 tahun tak kunjung di perbaiki. Hal ini disebabkan

tingkat pengelolaan dana desa di Desa Pojok Kecamatan Campurdarat belum maksimal, dikarenakan belum terdapat peraturan yang mewajibkan suatu badan atau dinas untuk melaporkan pertanggungjawaban dalam hal laporan keuangannya kepada masyarakat. Sehingga masyarakat masih meragukan pengelolaan dana desa tersebut untuk apa saja.

### **Pengaruh Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah terhadap Kepercayaan Masyarakat**

Berdasarkan hasil penelitian ini dapat dinyatakan bahwa pengelolaan dana desa tidak berpengaruh signifikan terhadap kepercayaan masyarakat. Menurut teori Harianto (2007) dimana PAD merupakan salah satu sumber perbelanjaan daerah, jika PAD meningkat maka dana yang dimiliki oleh pemerintah daerah akan semakin meningkat pula sehingga pemerintah daerah akan terus menggali potensi-potensi di daerah dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Hal ini sejalan dengan penelitian Priyo Hari Adi (2013) berupaya untuk mengetahui dampak kepercayaan masyarakat terhadap pendapatan asli daerah dan hasil yang sama diperoleh bahwa PAD berpengaruh terhadap kepercayaan masyarakat. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya responden yang menjawab setuju dan sangat setuju. Pengelolaan PAD secara langsung menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam menjalankan dan mengelola PAD untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Dengan adanya pengelolaan yang baik yang dilakukan oleh pemerintah daerah, pemerintah dapat menunjukkan keselarasan antara program dan kegiatan serta pengembangan program sesuai dengan aspirasi dan kebutuhan masyarakat.

### **Pengaruh Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa dan Pengelolaan Asli Daerah Terhadap Kepercayaan Masyarakat**

Hasil dari peneliti yang di uji dengan simultan melalui SPSS 26 maka hasilnya terdapat pengaruh akuntabilitas pengelolaan dana desa dan pengelolaan pendapatan asli daerah terhadap kepercayaan masyarakat Desa Pojok Kecamatan Campurdarat Kabupaten Tulungagung. Ini juga dikuatkan dengan nilai R square sebesar 0,432 hal ini menunjukkan bahwa presentase sumbangan variabel independent yaitu akuntabilitas, dana desa, pendapatan asli daerah terhadap variabel dependen kepercayaan masyarakat yaitu sebesar 43% atau variasi variabel independent akuntabilitas, dana desa, pendapatan asli daerah yang digunakan dalam model mampu menjelaskan 43% variabel dependen kepercayaan masyarakat, sementara itu, 57% lainnya dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model penelitian.

### **PENUTUP** **Kesimpulan**

Berdasarkan temuan penelitian ini dapat ditarik kesimpulan bahwa hanya pendapatan asli daerah yang berpengaruh signifikan terhadap kepercayaan masyarakat. Sedangkan akuntabilitas dan pengelolaan dana desa tidak berpengaruh signifikan terhadap kepercayaan masyarakat Desa Pojok, Kecamatan Campurdarat, Kabupaten Tulungagung. Hal ini disebabkan minimnya pemahaman masyarakat desa terhadap pertanggung jawaban laporan keuangan, kurangnya keterbukaan, dan sosialisasi dari pemerintah desa. Meskipun demikian, pengelolaan pendapatan asli daerah cukup bisa dirasakan oleh masyarakat ditunjukkan dengan adanya keselarasan antara

program dengan kegiatan serta adanya pengembangan program sesuai aspirasi dan kebutuhan masyarakat.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Aucoin, P., & Heitman, R. (2000). *The Dialectics of Accountability for Performance in Public Management Reform. Internasional Review of Administrative Sciences*, 66, 1. 45-55
- Azhal, F dan Syam, A. (2017). *Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus di Desa Uekuli Kabupaten Tojo Kabupaten Tojo Una-Una)*. skripsi. Universitas Hasanuddin, Makassar.
- Halimatussa'diyah. (2012). *Blogspot*. [www.blogspot.com](http://www.blogspot.com). Diakses pada tanggal 14 maret 2023.
- Irma, A. (2015). "Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Kecamatan Dolo Selatan Kabupaten Sigi". *Jurnal katalogis*. V3, (1). Hlm 55.
- Karamoy, H dan dkk. (2017). "Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Di Kecamatan Kotamubagu Selatan Kotamobagu". Universitas Sam Ratulangi, Manado.
- Mahayani, N. L. A. (2017). *Prosocial Behavior Dan Persepsi Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Dalam Konteks Budaya Tri Hita Karana*. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Bisnis*, 12, 2. 129-144
- Martah, W. (2014). *Pengaruh transparansi dan akuntabilitas terhadap kinerja instansi pemerintah pada dinas kota bandung (survey instansi pemerintah di kota bandung)*. Fakultas Ekonomi Universitas Widyatama, Bandung.
- Maryam, NS. (2016). "Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik". *Jurnal Ilmu Politik Dan Komunikasi*. VI, (1). Hlm 67
- Muhidin, A. (2017). "Evaluasi Kebijakan Publik (Studi Kasus Kesiapan Menerima Dana Desa di Kabupaten Gowa)". Program Pascasarjana Universitas Negeri Makassar, Makassar.
- Muis, MHK. (2014). "Analisi Imlementasi Good Governance dalam Pelayanan Publik Di Kecamatan Panakukang Kota Makassar". *Jurnal ilmu pemerintahan*. V7, (2). Hlm 67-70.
- Mustofa, A. I. (2012). *Pengaruh Penyajian Dan Akseibilitas Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Kabupaten Pematang. Accounting Analysis Journal*, 1, 1. 1-6
- Nawawi, Juanda. (2009). "Membangun Kepercayaan Dalam Mewujudkan Good Governance". *Jurnal Ilmu Pemerintahan*. V2. (1). Hlm 34-37.
- Rahmawati, NE. (2013). *Pengaruh Akuntabilitas dan Trasparansi Pemerintah Daerah Terhadap Kepuasan dan Kepercayaan Masyarakat*. Skripsi. Universitas Gajah Madah.
- Supadmi, N. L., & Suputra, I. D. G. (2018). *Pengaruh Kapasitas Sumberdaya Manusia, Kejelasan Sasaran Anggaran Dan Sistem Pelaporan Keuangan Pada Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Di Kota Denpasar*. *Jurnal Ekonomidan Pariwisata*, 13, 2.

